

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN TIMUR DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Emi Rohaimi¹, Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si², Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, M.Si³

¹ Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

² Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Korespondensi: <mailto:emirohaimi21@gmail.com>

Abstract : *Strategy of the General Election Commission (KPU) of East Kalimantan in Increasing Voter Participation Rates in the 2024 Simultaneous Elections, Emi Rohaimi, Postgraduate Masters Program in Public Administration at Mulawarman University, February 2022, Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si and Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, M.Si.*

This study aims to produce a choice of strategies and efforts that can be considered by the East Kalimantan KPU in increasing voter turnout in the 2024 election. The study uses a SWOT analysis model in a qualitative approach.

The results of the study show: 1. That there are a number of strategic options for the East Kalimantan KPU, namely (1) SO: regulation, internal-external cooperation, completing infrastructure, optimizing funding sources. (2) WO: optimizing human resources with stakeholders and new partners, strengthening communication and coordination partnerships, controlling critical thinking, and developing creativity. (3) ST: regulation suppresses negative competition, HR suppresses hardline and transactional group thinking; National government and local government funding; complete the facilities and infrastructure; strategies and methods of controlling critical thinking in urban communities. (4) WT: preventing negative competition for election participants, optimizing ethok officers or volunteers as well as driving cadres, developing Regency/City KPU creativity; communication and coordination prevent misunderstandings; critical and intelligent thinking control partnership; 2. Efforts that can be made by the East Kalimantan KPU to increase voter participation rates. (1) Internal strengthening, utilizing and empowering strengths and minimizing weaknesses. Improving the quality of human resources, partnerships with educational and political institutions, as well as suffrage education. (2) Paying attention to national and regional dynamics to deal with external conditions with the assistance of Regency/Municipal KPU for well-targeted socialization.

Keywords: *Strategy to increase voter participation, General Election.*

Abstrak

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Emi Rohaimi, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, M.Si, sebagai Pembimbing II.

Penelitian bertujuan menghasilkan pilihan strategi dan upaya yang dapat dipertimbangkan KPU Kalimantan Timur dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024. Penelitian menggunakan model analisis SWOT dalam pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian : 1. Terdapat sejumlah pilihan-pilihan strategi KPU Kaltim yakni (1) SO: regulasi, kerjasama internal-eksternal, melengkapi sarana prasana, optimalisasi sumber pendanaan. (2) WO: optimalisasi SDM bersama stakeholders dan mitra baru, kemitraan penguatan komunikasi dan koordinasi, pengendalian pemikiran kritis, dan pengembangan kreatifitas. (3) ST: regulasi menekan persaingan negatif, SDM menekan pemikiran kelompok garis keras dan transaksional; pendanaan pempus dan pemda; melengkapi sarana dan prasarana; strategi dan metode pengendalian pemikiran kritis masyarakat kota. (4) WT: pencegah persaingan negatif peserta pemilu, optimalisasi petugas etnik atau relawan serta kader penggerak, pengembangan kreatifitas KPU Kabupaten/Kota; komunikasi dan koordinasi mencegah kesalahpahaman; dan kemitraan pengendalian pemikiran kritis dan cerdas; 2. Upaya yang dapat dilakukan KPU Kaltim meningkatkan angka partisipasi pemilih (1) Penguatan internal, memanfaatkan dan memberdayakan kekuatan dan meminimalisir kelemahan. Peningkatan kualitas SDM, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan politik, serta edukasi hak pilih. (2) Memperhatikan dinamika nasional dan daerah untuk menghadapi kondisi eksternal dengan pendampingan KPU Kabupaten/Kota untuk sosialisasi yang tepat sasaran.

Kata kunci: Strategi peningkatan partisipasi pemilih, Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Salah satu indikator suksesnya pemilu ialah partisipasi politik masyarakat untuk memberikan suaranya guna menentukan sang pemimpin. Maka pemerintah harus membangun komunikasi pada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Namun untuk membangun kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu tidaklah mudah terutama pada masyarakat yang awam terhadap politik, masih banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi golongan putih (golput), sebagai suatu istilah untuk menyatakan *abstein* atau netral tidak memberikan hak suara pada pemilu yang dilakukan dan disebabkan oleh berbagai faktor.

Jumlah partisipasi pemilih di Kalimantan Timur masih menjadi Provinsi dengan jumlah partisipasi yang rendah dengan tidak mencapai target Nasional baik pada saat Pemilu serentak tahun 2018 maupun 2019. Menurut pemberitaan media Pro Kaltim (2018:1) pesta demokrasi Pilgub Kaltim 2018 yang telah dilaksanakan, hanya 59,82 persen warga yang menggunakan hak pilihnya. Angka itu jauh dari target partisipasi nasional sebesar 77 persen. Artinya, sebanyak 912.802 (40,18 persen) warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) tak menyalurkan suaranya alias masuk golongan putih (golput). Dari jumlah pemilih yang menyalurkan suara, ada 3 persen yang tidak sah atau sebanyak 49.855 surat suara.

Sementara perhitungan data Pemilu Serentak Tahun 2019 di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur belum secara keseluruhan mencapai angka partisipasi masyarakat sesuai target nasional yang dibebankan oleh KPU RI. Selanjutnya menurut artikel Jurnaliston (2019:1) bahwa tingkat partisipasi pemilih sebesar 74,60 persen. Masih kurang dari target yang

dibebankan oleh KPU RI yaitu 77,50 persen. Hal ini juga berarti bahwa masih terdapat 22,50 persen daftar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak di Kalimantan Timur. Bahkan jika dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur yang dilaksanakan Tahun 2018 walaupun pada Tahun 2019 mengalami pertumbuhan jumlah partisipasi pemilu namun tetap belum mencapai target Nasional. Namun kondisi ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri, terutama untuk menghadapi pemilu periode selanjutnya, dalam hal ini pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada persentase tren angka data pemilih yang menggunakan hak pilih pada tahun 2018-2020 berikut ini.

Tabel 1
Persentase Penggunaan Hak Pilih

Jika dipersentasikan tren angka data pemilih yang menggunakan hak pilih pada tahun 2018-2020 sebagaimana disajikan pada tabel 1 dibawah ini. Sehingga dapat diketahui dinamika tren persentase penggunaan hak pilih pada masing-masing daerah pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja KPU Kalimantan Timur.

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%) Penggunaan Hak Pilih berdasarkan data pemilih		
		2018	2019	2020
1	Kutai Kartanegara	52	77	57
2	Kutai Timur	71	53	63
3	Kutai Barat	60	78	71
4	Mahakam Ulu	62	74	74
5	Paser	55	76	67
6	PPU	47	80	-
7	Berau	38	50	68
8	Balikpapan	63	75	59
9	Samarinda	58	72	52
10	Bontang	57	77	71
Jumlah Keseluruhan		57	71	60

Sumber: KPU Kaltim 2021, diolah peneliti 2022

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018, hanya Kabupaten Kutai Timur yang berada di atas 70% masyarakat yang terdata sebagai pemilih untuk memberikan hak suara di TPS. Kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, semua Kabupaten/Kota berhadil meningkatkan angka partisipasi pemilih, kecuali Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Kabupaten Kutai Timur dengan angka 53% atau turun dari tahun 2018 yang berhasil mencapai 71%, sednagkan bagi Kabupaten Berau meskipun masih dibawah angka 70% namun pada dasarnya terjadi kenaikan sebesar 12% menjadi 50% pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya yang hanya 38%.

Secara keseluruhan kondisi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 tentu menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi KPU Kalimantan Timur

terutama untuk menghadapi pemilu periode selanjutnya, dalam hal ini pemilu tahun 2024 mendatang. Berbagai strategi dan langkah tindak yang telah dilakukan oleh KPU Kalimantan Timur melalui kebijakan dan melibatkan komponen baik eksternal maupun internal stakeholders namun belum menunjukkan hasil yang optimal.

Terdapat berbagai faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan hak suaranya, seperti beberapa diantaranya tidak mengetahui pasangan calon yang mengikuti pemilu khususnya untuk pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD, ketidakpercayaan masyarakat terhadap para kandidat dalam pemilu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya sehingga merasa melakukan pemilihan bukanlah kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Kondisi tersebut disebabkan minimnya informasi yang diperoleh dan kurangnya motivasi untuk melakukan pemilihan karena merasa tidak berdampak positif bagi mereka sebagai pemilih. Oleh karena itu, sosialisasi sangat diperlukan dengan strategi komunikasi yang tepat dan menggugah agar masyarakat semakin mantap untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Salah satu upaya adalah melalui penelitian ini yang bukan saja mengenai strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh KPU pada tahun 2019, tetapi juga dengan metode yang tepat memberikan rancangan strategi komunikasi bagi KPU di masa pemilu mendatang. Dengan demikian diharapkan peningkatan peserta pemilu yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menentukan kemajuan pembangunan sesuai dengan tingkatan kedudukan atau jabatan politik yang dikontestasikan.

Kerangka Teori

Menurut pendapat Hovland dalam Effendy (2004:10) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behaviour of other individuals*). Jadi pada dasarnya komunikasi merupakan sebuah proses yang bertujuan mengubah perilaku bahkan sikap orang lain, atas keinginan individu yang melakukan komunikasi. Secara sederhana, bahwa melalui sebuah komunikasi yang dirancang dengan baik, maka seseorang dapat mengubah perilaku seseorang dengan informasi yang disampaikannya. Sedangkan dari sudut pandang aktif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Saputri (2009:1) bahwa komunikasi adalah sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada kebiasaannya kegiatan komunikasi tersebut dilakukan secara verbal atau lisan, sehingga memberi kemudahan bagi kedua belah pihak untuk saling memahami maksud dari informasi yang diberikan secara langsung.

Selanjutnya Hoben dalam Mulyana (2010:61), berasumsi bahwa komunikasi (harus) berhasil, sehingga memberi definisi komunikasi sebagai pertukaran verbal pikiran atau gagasan. Dibalik asumsi tersebut menjelaskan bahwa suatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. Dalam arti bahwa pikiran atau gagasan dipertukarkan dari seseorang yang berperan

sebagai komunikator atau pemberi gagasan, dan diterima dengan baik oleh penerima gagasan yang berperan sebagai komunikan.

Dengan demikian, komunikasi dapat merubah perilaku seseorang atas kemampuan komunikator atau seseorang yang berperan sebagai penyampai informasi. Dengan komunikasi yang baik dan benar, serta dengan didukung oleh cara komunikasi yang meyakinkan, maka informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pola perilaku komunikan atau penerima pesan.

Setiap tindakan tentu ada tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan kegiatan komunikasi atau berkomunikasi. Menurut Hovland dalam Mulyana (2010:61) bahwa tujuan dilakukannya komunikasi adalah sebagai berikut ; a. Perubahan sikap (*attitude change*); b. Perubahan pendapat (*opinion change*); c. Perubahan perilaku (*behaviour change*); dan Perubahan sosial (*social change*).

Dengan demikian menurut Hovland bahwa komunikasi memberikan dampak yang luar biasa bagi sikap, pendapat, perilaku seseorang sebagai komunikan atau penerima informasi, bahkan dapat membawa pada perubahan sosial dalam skala yang lebih besar dan luas. Hovland menunjukkan kekuatan dari sebuah komunikasi yang dilakukan dengan terencana dan benar.

Komunikasi politik menjadi isu hangat setiap kali menjelang pemilihan kontestasi politik. Istilah komunikasi politik berasal dari 2 (dua) kata yang sudah sangat familiar di masyarakat, yakni kata komunikasi dan kata politik. Menurut Turner dan West dalam Junaedi (2019:23) bahwa komunikasi sebagai sebuah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol untuk menafsirkan makna dalam lingkungan mereka. Sedangkan politik menurut Budiardjo dalam Junaedi (2019:25) adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut karena sejak masa dahulu masyarakat selalu berusaha hidup secara kolektif atau bersama menghadapi hambatan yang dihadapi.

Penyampaian komunikasi yang baik memerlukan strategi yang tepat, agar memberikan dampak, kesan, atau pengaruh yang diinginkan. Strategi Komunikasi pada umumnya dipahami sebagai upaya ilmiah dengan menggunakan kemampuan strategi komunikasi dalam rangka penguatan politik. Menurut Liliweri (2011:39) strategi adalah sebuah konsep yang merujuk pada jaringan pemikiran, gagasan, pemahaman yang mendalam, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi, dan harapan yang memandu untuk membangun kerangka pikir yang sama sehingga kita dapat memutuskan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan. Dengan demikian terdapat banyak unsur yang membentuk kerangka pikir sehingga terjadi kesamaan tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut pendapat Rogers dalam Cangara (2013:61) yang memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Rogers menekankan pada proses pemindahan ide-ide baru dalam rangka mempengaruhi tingkah laku manusia.

Pakar perencanaan komunikasi Middleton dalam Saputri dkk (2019:109) memberikan definisi strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Artinya Middleton menekankan bahwa komunikasi akan terjadi dengan baik jika terjadi kombinasi semua elemen komunikasi, sehingga komunikasi terjadi dengan efektif.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan pendapat berupa definisi yang diberikan para pakar, maka dapat dipahami bahwa strategi komunikasi adalah sebagai suatu rancangan atau desain yang dirumuskan berdasarkan rangkaian pemikiran, gagasan, pemahaman yang mendalam dengan dukungan pengalaman yang melekat sehingga terjadi pembentukan persepsi baru dengan harapan terjadi perubahan perilaku, sikap, dan tindakan sebagai tujuan dari komunikasi.

Pembangunan di berbagai bidang akan sangat baik jika dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat. Menurut Tilaar (2009:287) memberikan makna partisipasi sebagai sebuah bentuk dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi, dimana dengan upaya meliputi pentingnya perencanaan dari bawah (*bottom up*), dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pada beberapa bidang yang memungkinkan. Pendapat lain diberikan oleh Adams dalam Bakti (2012:17) yang menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui perwujudan partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun kemandirian warga negara. Melalui partisipasi masyarakat, seorang individu telah menjadi warga publik, dan dapat membedakan antara permasalahan pribadi dan publik. Jika tanpa adanya partisipasi, ada kemungkinan hampir semua warga akan terbawa kepada pertunjukan kepentingan individu dan pemuasan kebutuhan pribadi pemilik kekuasaan.

Dengan memperhatikan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi sebagai suatu bentuk dari keinginan yang didasari harapan untuk mengembangkan demokras, baik sebagai warga publik maupun menjadi bagian dari publik di berbagai bidang, termasuk partisipasi yang dilakukan dalam bidang politik melalui pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam rangka memilih wakil rakyat maupun pimpinan pada jabatan politik melalui pesta demokrasi.

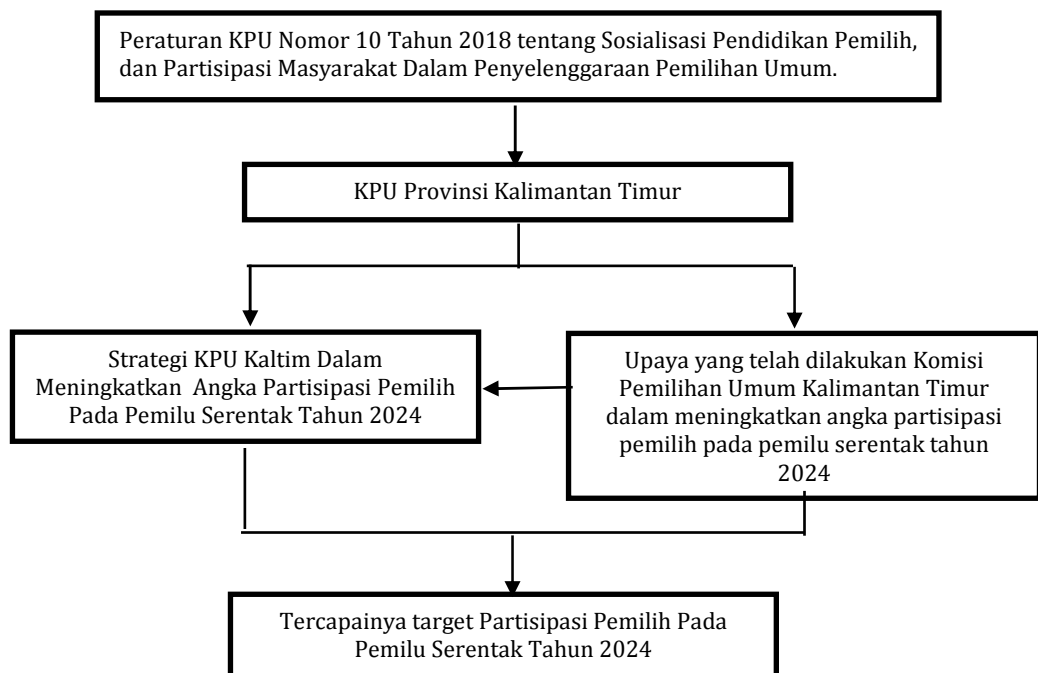
Oleh karena itu, partisipasi politik pada dasarnya tumbuh dari kesadaran untuk berpartisipasi dalam ranah politik melalui pesta demokrasi pemilu. Menurut Djalal dan Supriadi dalam Biru (2020:547) menjelaskan bahwa keterlibatan kelompok masyarakat dapat berupa penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, serta bahan dan jasa yang diperlukan.

Terdapat beberapa jenis partisipasi masyarakat secara umum, salah satunya adalah tipologi partisipasi politik. Dimana menurut Rahman (2007:288) sebagai suatu kegiatan dibedakan sebagai berikut ; a. Partisipasi aktif; b. Partisipasi pasif; c. Kelompok apatis. Ketiga jenis atau bentuk

tersebut merepresentasikan perhatian dan partisipasi masyarakat secara umum dalam berpolitik. Ada yang aktif, ada juga yang tidak memiliki kepedulian. Namun apatis, bukan berarti sama sekali tidak memberi perhatian, mereka tetap memberi perhatian, akan tetapi tidak memiliki akses atau memang lebih mementingkan pekerjaan sebagai upaya memenuhi kesejahteraan individu maupun keluarga.

Pada gambar bagan kerangka konseptual penelitian, penelitian didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menjadi pegangan KPU Kalimantan Timur untuk membangun kesadaran politik bagi pemilih pada semua jenjang usia yang berhak memberikan suara kepada para kontestan pemilu.

Sebagai upaya KPU Kalimantan Timur dalam meningkatkan kesadaran hak pilih bagi masyarakat, maka KPU perlu menyusun strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024, dan tentu berbagai strategi politik yang dibangun berhadapan dengan sejumlah faktor, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Bagi KPU Kalimantan Timur berbagai strategi tersebut dimaksudkan untuk tercapainya target partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024.



Gambar 1 Kerangka konseptual penelitian
Sumber: disusun oleh peneliti, 2021.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif, sehingga akan mampu memenuhi pencapaian tujuan penelitian. Lokasi penelitian adalah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur dengan alamat jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda.

Adapun fokus pada penelitian ini sebagai upaya mencapai tujuan penelitian mengacu pada teori strategi komunikasi politik, dengan memperhatikan konsep SWOT. Sumber data penelitian yang digunakan, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Pada penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan peneliti pilih dengan metode *purposive sampling* yakni kepada *key informan* dan *informan*, yakni sebagai berikut:

- 1) Key Informan: Bapak Mukhasan Ajib Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan PemilihPartisipasi Masyarakat dan SDM.
- 2) Informan:
 - a) Bapak Fahmi Idris sebagai Anggota KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan.
 - b) Bapak Suardi sebagai Anggota KPU Kaltim, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Data Sekunder pada penelitian ini adalah sejumlah data atau dokumen pendukung yang memperkaya informasi dari para informan. Adapun dokumen yang dimaksud dan berhubungan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Profil KPU Kalimantan Timur
- 2) Dokumen Kebijakan berkenaan dengan partisipan pemilu.
- 3) Dokumen lain berdasarkan informasi saat wawancara, seperti desain alat peraga komunikasi KPU Kaltim dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih, dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisa SWOT Penelitian

Melalui alat analisa SWOT yang peneliti gunakan pada batasan deskriptif dengan srategi berdasarkan SO-WO-ST-WT, maka tabel temuan pada penelitian berdasarkan tabel yang peneliti adopsi sebagaimana digambarkan oleh Fahmi (2017:265).

Tabel 2. Hasil Analisa SWOT Penelitian

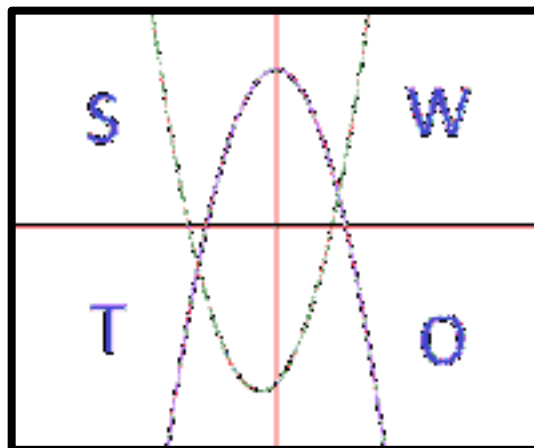
SWOT	Strenghts (S) (Kekuatan) Kekuatan yang dimiliki KPU Kaltim.	Weakness (W) (Kelemahan) Kelemahan yang dimiliki KPU Kaltim
	1. Regulasi dari pusat; 2. Sarana dan Prasarana	1. SDM KPU Kaltim secara struktural dan Kinerja SDM

	yang dimiliki; dan 3. Strategi dan Metode KPU Kaltim berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pemilu sebelumnya	secara fungsional belum optimal. 2. Anggaran pendanaan 3. Letak Geografis Kaltim yang masih terdapat wilayah 3T dengan akses yang terbatas.
Opportunities (O) (Peluang) Segala peluang yang dimiliki KPU Kaltim. 1. Jumlah partai peserta pemilu cukup banyak dan dapat menjadi mitra sosialisasi. 2. Stakeholder penyelenggara pemilu lain yaitu Bawaslu dan Kesbangpol. 3. Antusiasme masyarakat yang semakin berkembang. 4. peluang dana hibah dari pihak daerah baik provinsi, Kabupaten/Kota. 5. Adanya relawan demokrasi. 6. Stakeholder seperti ormas dan LSM Pemerhati pemilu, pihak sekolah tingkat SLTA, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta melalui peran dosen dan unit kegiatan mahasiswa, dan petuga ethok, PPK, PPS maupun KPPS, serta Media Sosial.	Strategi untuk SO Pemanfaatan kekuatan untuk meraih peluang. 1. Regulasi memberi peluang penyusunan strategi peningkatan partisipasi pemilu dengan kerjasama kepada berbagai pihak, baik sesama lembaga dan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk turut mensukseskan pemilu seperti Bawaslu dan Kesbangpol, serta pihak lain yang memberi perhatian pada suksesi pemilu. 2. Sarana prasana semakin lengkap dengan dukungan IT dan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kekinian. 3. Pengalaman KPU Kaltim dalam menyusun strategi dan metode dalam menyelenggarakan Pemilu.	Strategi untuk WO Upaya mengatasi kelemahan dengan peluang yang ada. 1. Kinerja SDM KPU secara struktural dan fungsional semakin optimal dengan dukungan para stakeholder pemilu dan mitra lain sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. 2. Kerjasama SDM KPU Kaltim dan para kandidat, ormas/LSM dan pelajar-mahasiswa akan memperkuat peningkatan angka partisipasi pemilih; 3. Kerjasama dan partisipasi berbagai pihak, akan turut mengatasi pendanaan beserta pengelolaan. 4. Solidnya kemitraan di berbagai lini memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kendala komunikasi dan informasi terutama di daerah 3T. 5. Antusiasme masyarakat yang semakin tinggi akan mengurangi dan mengatasi permasalahan dan kendala sosialisasi untuk menyikapi letak geografis.
Threats (T) (Ancaman) Ancaman yang harus diwaspadai KPU Kaltim. 1. Ancaman dari peserta pemilu yang saling bersaing.	Strategi untuk ST Pemanfaatan kekuatan untuk menghindari ancaman. 1. Regulasi dari pusat dapat menekan persaingan negatif	Strategi untuk WT Menekan kelemahan dan mencegah ancaman. 1. Kinerja SDM menjadi lebih di optimal bersama dukungan stakeholders dan mitra lain untuk mencegah

2. Ancaman dari masyarakat yang tidak setuju adanya pemilu demokrasi. 3. Masyarakat perkotaan yang semakin kritis. 4. Ancaman non alam yaitu pandemi Covid-19.	peserta pemilu; 2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat mendukung petugas pelaksana sosialisasi untuk menghindari atau mengatasi ancaman non alam; dan 3. Strategi dan Metode KPU Kaltim dengan pengalaman dapat dioptimalkan mengendalikan kecerdasan dan/atau pemikiran kritis masyarakat kota, bahkan yang kritis terhadap konsep demokratis.	persaingan negatif antar peserta pemilu. 2. Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra akan mampu menekan ancaman dari masyarakat yang tidak sepaham dengan sistem demokrasi. 3. Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra harus dioptimalkan mengendalikan dan mengarahkan pemikiran masyarakat yang semakin kritis. 4. Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra yang terkoordinasi akan mampu mengatasi masalah komunikasi dan informasi pada wilayah 3T. 5. Kreatifitas dan kemauan KPU Kaltim bersama Kabupaten/Kota dan para stakeholders serta mitra mampu mengatasi ancaman non alam dengan baik; dan 6. Kemitraan harus mampu menekan kondisi masyarakat yang semakin pintar, kritis dan cerdas.
---	---	--

Sumber: Fahmi (2017:265), dikembangkan peneliti, 2021.

Melalui tabel di atas, peneliti menunjukkan beberapa temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan, baik dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk memperkuat matrik di atas, peneliti sajikan kurva SWOT untuk melihat sumbu atau titik strategi KPU dalam rangka peningkatan angka partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024.



Gambar 1. Kurva Balance Score
Sumber: disusun peneliti, 2022

Berdasarkan gambar kurva di atas, maka menurut peneliti bahwa antara SW-OT secara internal dan eksternal, maka kondisi KPU Kaltim dalam rangka peningkatan angka partisipasi pemilih dimana bahwa titik potong antara weakness dan threats yang berarti bahwa adanya hubungan W-T. dimana dalam Menekan kelemahan dan mencegah ancaman dengan upaya

- 1) Kinerja SDM menjadi lebih di optimal bersama dukungan stakeholders dan mitra lain untuk mencegah persaingan negatif antar peserta pemilu.
- 2) Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra akan mampu menekan ancaman dari masyarakat yang tidak sepaham dengan sistem demokrasi.
- 3) Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra harus dioptimalkan mengendalikan dan mengarahkan pemikiran masyarakat yang sekamin kritis.
- 4) Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra yang terkoordinasi akan mampu mengatasi masalah komunikasi dan informasi pada wilayah 3T.
- 5) Kreatifitas dan kemauan KPU Kaltim bersama Kabupaten/Kota dan para stakeholders serta mitra mampu mengatasi ancaman non alam dengan baik; dan

- 6) Kemitraan harus mampu menekan kondisi masyarakat yang semakin pintar, kritis dan cerdas.

Kondisi KPU Kaltim dalam rangka peningkatan angka partisipasi pemilih dimana pada kondisi SW di jelaskan sebagai berikut.

Kekuatan yang dimiliki KPU Kaltim.

- 1) Regulasi dari pusat;
- 2) Sarana dan Prasarana yang dimiliki; dan
- 3) Strategi dan Metode KPU Kaltim berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pemilu sebelumnya

Kelemahan yang dimiliki KPU Kaltim

- 1) SDM KPU Kaltim secara struktural dan Kinerja SDM secara fungsional belum optimal.
- 2) Anggaran pendanaan
- 3) Letak Geografis Kaltim yang masih terdapat wilayah 3T dengan akses yang terbatas

Strategi SWOT

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2024.
 - 1) Strategi SO atau Pemanfaatan kekuatan untuk meraih peluang.
 - a) Regulasi memberi peluang penyusunan strategi peningkatan partisipasi pemilu dengan kerjasama kepada berbagai pihak, baik sesama lembaga dan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk turut mensukseskan pemilu seperti Bawaslu dan Kesbangpol, serta pihak lain yang memberi perhatian pada suksesi pemilu.
 - b) Sarana prasana semakin lengkap dengan dukungan IT dan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kekinian.
 - c) Pengalaman KPU Kaltim dalam menyusun strategi dan metode dalam menyelenggarakan Pemilu.
 - 2) Strategi untuk ST atau Pemanfaatan kekuatan untuk menghindari ancaman.
 - a) Regulasi dari pusat dapat menekan persaingan negatif peserta pemilu;
 - b) Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat mendukung petugas pelaksana sosialisasi untuk menghindari atau mengatasi ancaman non alam; dan
 - c) Strategi dan Metode KPU Kaltim dengan pengalaman dapat dioptimalkan mengendalikan kecerdasan dan/atau pemikiran kritis masyarakat kota, bahkan yang kritis terhadap konsep demokratis.

- 3) Strategi untuk WT atau menekan kelemahan dan mencegah ancaman.
 - a) Kinerja SDM menjadi lebih optimal bersama dukungan stakeholders dan mitra lain untuk mencegah persaingan negatif antar peserta pemilu.
 - b) Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra akan mampu menekan ancaman dari masyarakat yang tidak sepuas dengan sistem demokrasi.
 - c) Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra harus dioptimalkan mengendalikan dan mengarahkan pemikiran masyarakat yang semakin kritis.
 - d) Kekuatan KPU Kaltim bersama stakeholders dan para mitra yang terkoordinasi akan mampu mengatasi masalah komunikasi dan informasi pada wilayah 3T.
 - e) Kreatifitas dan kemauan KPU Kaltim bersama Kabupaten/Kota dan para stakeholders serta mitra mampu mengatasi ancaman non alam dengan baik.
- 4) Strategi untuk WO upaya mengatasi kelemahan dengan peluang yang ada
 - a) Kinerja SDM KPU secara struktural dan fungsional semakin optimal dengan dukungan para stakeholder pemilu dan mitra lain sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing.
 - b) Kerjasama SDM KPU Kaltim dan para kandidat, ormas/LSM dan pelajar-mahasiswa akan memperkuat peningkatan angka partisipasi pemilih;
 - c) Kerjasama dan partisipasi berbagai pihak, akan turut mengatasi pendanaan beserta pengelolaan.
 - d) Solidnya kemitraan di berbagai lini memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kendala komunikasi dan informasi terutama di daerah 3T.
 - e) Antusiasme masyarakat yang semakin tinggi akan mengurangi dan mengatasi permasalahan dan kendala sosialisasi untuk menyikapi letak geografis.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Strategi akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024, antara lain :

- 1) Memperkuat kondisi internal KPU Kaltim, yakni memanfaatkan dan memberdayakan kondisi kekuatan (Strenght) dan meminimalisir kondisi kelemahan (weakness). Wujud program kerja yang telah dilakukan seperti pemetaan kekuatan SDM, kemitraan dengan lembaga bidang pendidikan dan politik, serta memberikan edukasi tentang pentingnya

penggunaan hak pilih atau hak suara kepada pemilih pemula yakni pelajar dan mahasiswa.

- 2) Memperhatikan dinamika sosial politik di tanah air dan daerah sebagai upaya menghadapi kondisi eksternal KPU Kaltim. Salah satu yang akan dilakukan adalah penguatan KPU Kabupaten/Kota dalam hal mengupayakan sosialisasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian di atas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur menyadari kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk menghasilkan strategi-strategi yang dapat memajukannya dari berbagai faktor yang ada, termasuk dalam pengambilan keputusan. Namun demikian perlu adanya dukungan dari semua unsur utama maupun pendukung agar peningkatan angka partisipasi pemilih dapat dicapai.

Daftar Pustaka

- Bakti, Andi Faisal dkk. 2012. Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi, Penerbit: Churia Press Jakarta.
- Biru, Mayang Indriany Risna. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 2, 2020 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id © Copyright 2020: 545-558.
- Cangara, Hafied. 2018. Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi, Penerbit: Rajawali Pers Depok.
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. Dinamika Komunikasi, Penerbit: Remaja Rosda Karya Bandung.
- Fahmi, Irham. 2017. Manajemen Strategis: Teori dan Aplikasi, Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Junaedi, Fajar. 2019. Komunikasi Politik: teori, aplikasi, dan strategi di Indonesia, Penerbit: Buku Litera Yogyakarta.
- Liliweri, Alo. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Penerbit: PT. Kencana, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. XIV. Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraa Pemilihan Umum.
- Pro Kaltim. 2018. 912 Ribu Golput Sia-siakan Pilgub Rp 310 M. <https://kaltim.prokal.co/read/news/334568-912-ribu-golput-sia-siakan-pilgub-rp-310-m>
- Rahman, A. H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.

- Reza Jurnaliston, Nasional Kompas. Pemilu 2019, KPU Optimistis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai.<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai>
- Saputri, Yunisda Dwi. 2019. Proses Komunikasi dan Pengertiannya Menurut Para Ahli.
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877665/proses-komunikasi-dan-pengertiannya-menurut-para-ahli>.
- Tilaar, H.A. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, Penerbit: Rineka Cipta Jakarta.